

Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bali

I Made Arya Udayana^{1✉}, Ni Luh Putu Ratna Sari², Rahmat Salam³

(1) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

(2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

(3) Department of Public Policy, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Abstrak: Implementasi kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat seperti Provinsi Bali. Berbagai kebijakan di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pariwisata, dan penanggulangan bencana telah diterapkan oleh pemerintah daerah Bali dalam dua dekade terakhir. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan publik di Bali serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis. Data dikumpulkan dari 25 artikel jurnal, prosiding, dan disertasi yang relevan dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik di Bali yang berbasis kearifan lokal, kolaborasi pemerintah dan desa adat, serta partisipasi masyarakat cenderung memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat administratif dan top-down menunjukkan efektivitas yang terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali.

Abstract: *Public policy implementation is a strategic governmental instrument for improving public welfare, particularly in regions with strong socio-cultural characteristics such as Bali Province. Various policies in health, social affairs, economy, tourism, and disaster management have been implemented by the Balinese local government over the past two decades. However, their effectiveness and impact on community welfare remain varied. This study aims to comprehensively analyze the implementation of public policies in Bali and their impact on public welfare using a qualitative approach based on a systematic literature review. Data were collected from 25 journal articles, proceedings, and dissertations and analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that public policies grounded in local wisdom, government-custodial village collaboration, and community participation tend to have a positive impact on welfare. In contrast, policies that are administrative and top-down show limited effectiveness. This study highlights the importance of contextual, participatory, and sustainable approaches in public policy implementation to enhance community welfare in Bali.*

Article history:

Received: 19 March 2024

Revised: 06 April 2024

Accepted: 23 April 2024

Published: 23 May 2024

Kata Kunci:

kebijakan publik, kesejahteraan, implementasi kebijakan, Bali, tata kelola pemerintahan

Keyword:

public policy, welfare, policy implementation, bali, local governance

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to cite: Udayana, I. M. A., Ratna Sari, N. L. P., & Salam, R. (2024). Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bali. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 57–65. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i2.393>

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan fundamental dari penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai sarana redistribusi sumber daya, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik menjadi fase

krusial yang menentukan apakah tujuan normatif kebijakan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegagalan implementasi sering kali menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, sehingga berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat daerah, implementasi kebijakan publik memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan lokal. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur sosial masyarakat Bali yang kuat berbasis desa adat, nilai-nilai kearifan lokal, serta ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor pariwisata menjadikan Bali sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan publik telah diterapkan oleh pemerintah daerah Bali di sektor kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan penanggulangan bencana, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Bali tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial budaya dan partisipasi masyarakat. Sumada dan Samudra (2023) menegaskan bahwa kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Bali menuntut pendekatan interdisipliner yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan implementor dalam memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat Bali. Hal ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan publik bersifat kontekstual dan tidak dapat diseragamkan antarwilayah.

Di sektor kesehatan, kebijakan publik di Bali menunjukkan kecenderungan integratif antara pendekatan modern dan tradisional. Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan nilai budaya lokal (Widnyana et al., 2024). Selain itu, kebijakan pelarangan iklan layanan kesehatan tradisional oleh praktisi tertentu diterapkan untuk melindungi masyarakat dari praktik yang tidak bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan (Widnyana & Winia, 2024). Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dipahami secara holistik, mencakup aspek fisik, sosial, dan budaya.

Pengalaman Bali dalam menangani pandemi Covid-19 juga memberikan gambaran penting mengenai implementasi kebijakan publik berbasis kearifan lokal. Penanganan Covid-19 di Bali melibatkan peran aktif desa adat melalui regulasi lokal seperti Pararem Gering Agung, yang mengintegrasikan dimensi sekala dan niskala dalam kebijakan publik (Sari et al., 2022). Model penanganan tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan memperkuat solidaritas sosial. Studi Sukadana et al. (2022) dan Yudartha (2020) juga menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan desa adat berkontribusi signifikan terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.

Selain sektor kesehatan, kebijakan publik di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti dana desa, Gerbang Sadu Mandara, dan Program Keluarga Harapan. Penelitian Kalpika Sunu dan Utama (2019) menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten dan kota di

Bali. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sudana et al. (2019) yang menegaskan bahwa Program Gerbang Sadu Mandara berkontribusi terhadap penguatan ekonomi desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

Namun demikian, implementasi kebijakan kesejahteraan sosial tidak selalu menghasilkan dampak yang optimal. Udayana dan Sukraaliawan (2022) menemukan bahwa kebijakan BLT-Dana Desa di Bali meskipun efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi, juga menimbulkan potensi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Widanti dan Dewi (2022) menambahkan bahwa implementasi kebijakan hibah dan bantuan sosial di tingkat kabupaten menghadapi berbagai hambatan administratif dan koordinatif yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh tata kelola dan mekanisme implementasinya.

Sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali juga menjadi fokus penting dalam kajian implementasi kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan pariwisata massal yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Salam et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan pariwisata di Bali perlu diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta budaya. Ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan pariwisata dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, terutama dalam jangka panjang.

Di bidang pertanian dan lingkungan, implementasi kebijakan publik di Bali juga menghadapi tantangan serupa. Sahri (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIMANTRI dan SIPADU yang bertujuan mendorong pertanian berkelanjutan belum sepenuhnya mencapai keadilan distributif dan keberlanjutan ekologis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan secara komprehensif agar kebijakan publik benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan implementasi kebijakan publik juga terlihat pada sektor transportasi publik. Program Trans Sarbagita yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan mobilitas masyarakat menghadapi berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat penggunaan layanan (Widhyastuti, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh perencanaan dan implementasi yang matang.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu, terlihat bahwa implementasi kebijakan publik di Bali menunjukkan hasil yang beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, dan koordinasi antaraktor. Meskipun telah banyak studi yang membahas kebijakan publik di Bali secara sektoral, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan publik secara lintas sektor dan mengaitkannya secara komprehensif dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada satu sektor atau satu jenis kebijakan tertentu, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai pola implementasi kebijakan publik di Bali.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik di Bali dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan sintesis lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperkaya kajian implementasi kebijakan publik

dalam konteks daerah berbasis kearifan lokal, serta secara praktis memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pola, konteks, dan dinamika implementasi kebijakan publik lintas sektor tanpa melakukan intervensi langsung di lapangan. Desain studi literatur sistematis digunakan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan secara terstruktur dan transparan sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Ruang Lingkup dan Lokasi Kajian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup implementasi kebijakan publik di Provinsi Bali pada berbagai sektor, meliputi kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pariwisata, pertanian, transportasi, dan penanggulangan bencana. Pemilihan Bali sebagai lokasi kajian didasarkan pada karakteristik daerah yang memiliki struktur sosial berbasis desa adat, ketergantungan ekonomi pada pariwisata, serta pengalaman kebijakan yang intensif dalam merespons krisis sosial dan kesehatan, khususnya selama pandemi Covid-19. Kajian ini tidak membatasi analisis pada satu kabupaten atau kota, melainkan mencakup kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dilaporkan dalam literatur.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari dokumen sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan disertasi yang telah dipublikasikan. Seluruh sumber data merupakan referensi yang tercantum dalam daftar pustaka artikel ini dan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik implementasi kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi dokumen secara sistematis dengan kriteria inklusi sebagai berikut: (1) membahas kebijakan publik atau implementasinya, (2) berfokus pada wilayah Bali atau relevan dengan konteks kebijakan daerah, dan (3) memuat analisis dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dokumen yang telah memenuhi kriteria inklusi kemudian dikompilasi dan diklasifikasikan berdasarkan sektor kebijakan, jenis kebijakan, serta fokus kesejahteraan yang dibahas. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian dan mendukung analisis lintas sektor.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana dilaporkan

dalam literatur. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pembacaan mendalam seluruh dokumen, (2) pengkodean tema berdasarkan sektor kebijakan dan dimensi kesejahteraan, (3) pengelompokan temuan yang serupa, dan (4) sintesis hasil analisis untuk menarik kesimpulan secara komprehensif.

Dalam proses analisis, peneliti tidak melakukan pengukuran kuantitatif atau pengujian statistik, melainkan menekankan pada interpretasi temuan empiris yang telah disajikan dalam penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil antarpenelitian dan mengidentifikasi kecenderungan umum dalam implementasi kebijakan publik di Bali.

Keabsahan dan Kredibilitas Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian yang membahas kebijakan serupa atau sektor yang sama. Selain itu, konsistensi tema dan kesesuaian konteks juga digunakan sebagai dasar untuk menilai kredibilitas temuan. Peneliti memastikan bahwa seluruh sitasi yang digunakan dalam analisis tersedia dalam daftar pustaka dan bahwa interpretasi hasil tetap sesuai dengan konteks dan temuan asli masing-masing penelitian.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder sehingga tidak menangkap dinamika terbaru yang mungkin terjadi setelah publikasi sumber-sumber yang dianalisis. Selain itu, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas dan cakupan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber data. Meskipun demikian, pendekatan studi literatur sistematis tetap relevan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Implementasi Kebijakan Publik Lintas Sektor di Bali

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Bali tersebar pada berbagai sektor strategis, dengan dominasi pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi. Kebijakan di sektor kesehatan, khususnya penanganan Covid-19 dan layanan kesehatan tradisional terintegrasi, menunjukkan tingkat intensitas kajian yang tinggi karena keterlibatan langsung masyarakat dan dampaknya yang segera terhadap kesejahteraan publik (Sari et al., 2022; Sukadana et al., 2022; Widnyana et al., 2024). Kebijakan sosial dan ekonomi, seperti dana desa, bantuan sosial, dan program pengentasan kemiskinan, juga banyak dikaji karena berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi masyarakat (Kalpika Sunu & Utama, 2019; Sudana et al., 2019; Prayasta & Budhi, 2021). Tabel 1 menyajikan ringkasan sektor kebijakan publik yang dikaji dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Bali.

Tabel 1. Sintesis Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bali

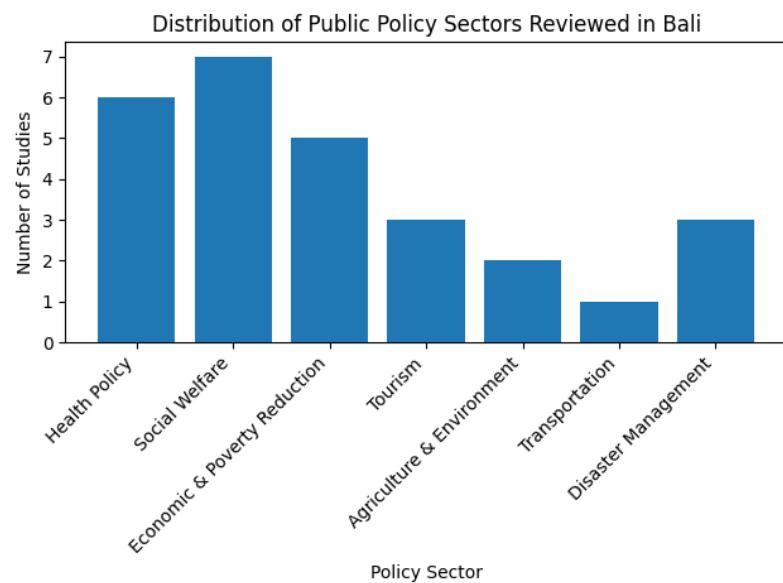
Sektor Kebijakan	Bentuk Kebijakan	Dampak terhadap Kesejahteraan	Sumber
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------

Kesehatan	Penanganan Covid-19 berbasis desa adat	Peningkatan kepatuhan dan perlindungan sosial	Sari et al. (2022); Sukadana et al. (2022)
Kesehatan	Integrasi layanan kesehatan tradisional	Akses layanan yang lebih inklusif	Widnyana et al. (2024)
Sosial	BLT-Dana Desa, hibah daerah	Perlindungan ekonomi jangka pendek	Udayana & Sukraaliawan (2022); Widanti & Dewi (2022)
Ekonomi	Dana desa, GSM	Penurunan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal	Kalpika Sunu & Utama (2019); Sudana et al. (2019)
Pariwisata	Pengelolaan pariwisata massal	Tantangan keberlanjutan kesejahteraan	Salam et al. (2024)
Pertanian	SIMANTRI dan SIPADU	Dampak terbatas terhadap keadilan ekologis	Sahri (2024)
Transportasi	Trans Sarbagita	Efektivitas rendah dalam peningkatan mobilitas	Widhyastuti (2016)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat sektoral dan sangat bergantung pada konteks implementasinya.

Distribusi Sektor Kebijakan Berdasarkan Literatur

Untuk memperkuat analisis, dilakukan pemetaan jumlah kajian berdasarkan sektor kebijakan yang diteliti. Diagram pada Gambar 1 menunjukkan distribusi sektor kebijakan publik yang paling banyak dibahas dalam literatur terkait Bali. Diagram ini tidak merepresentasikan data statistik lapangan, melainkan hasil klasifikasi empiris dari studi-studi yang dianalisis.



Gambar 1. Distribusi Sektor Kebijakan Publik yang Dikaji dalam Literatur Bali

Diagram tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial menjadi fokus utama penelitian, mencerminkan urgensi kebijakan di bidang tersebut dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masa krisis.

Efektivitas Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah tingginya efektivitas kebijakan publik yang mengintegrasikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Penanganan Covid-19 di Bali melalui desa adat dan regulasi lokal seperti Pararem Gering Agung terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan publik (Sari et al., 2022). Model ini memperkuat legitimasi kebijakan dan meminimalkan resistensi sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yudartha (2020) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam memperkuat tata kelola kebijakan.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam kebijakan kesehatan tradisional terintegrasi yang menghargai nilai budaya masyarakat Bali sekaligus menjaga standar layanan kesehatan (Widnyana et al., 2024). Implementasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks budaya terbukti lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Tantangan Implementasi

Di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan memberikan dampak positif terhadap perlindungan ekonomi masyarakat, terutama dalam kondisi krisis. Program dana desa dan GSM berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Kalpika Sunu & Utama, 2019; Sudana et al., 2019). Program Keluarga Harapan juga terbukti efektif menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga selama pandemi Covid-19 (Prayasta & Budhi, 2021).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan adanya tantangan implementasi, seperti potensi ketergantungan penerima manfaat dan hambatan administratif (Udayana & Sukraaliawan, 2022; Widanti & Dewi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dampak kebijakan kesejahteraan sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Keterbatasan Kebijakan Sektoral dan Implikasi Kebijakan

Kebijakan di sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi menunjukkan efektivitas yang relatif lebih rendah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pengelolaan pariwisata massal yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan dan ketimpangan ekonomi (Salam et al., 2024). Kebijakan pertanian berkelanjutan melalui SIMANTRI dan SIPADU juga belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan ekologis dan kesejahteraan petani (Sahri, 2024). Sementara itu, kebijakan transportasi publik Trans Sarbagita menghadapi kendala implementasi yang membatasi manfaatnya bagi masyarakat luas (Widhyastuti, 2016).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Bali memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap kesejahteraan masyarakat, tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, sensitivitas budaya, dan kapasitas kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan pendekatan kolaboratif dan adaptif agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik di Provinsi Bali memberikan dampak yang signifikan namun beragam terhadap kesejahteraan masyarakat, tergantung pada sektor kebijakan, pendekatan implementasi, serta konteks sosial budaya yang melingkupinya. Kebijakan publik di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi menunjukkan kontribusi positif yang

relatif lebih kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika kebijakan tersebut mengintegrasikan kearifan lokal, melibatkan partisipasi masyarakat, dan didukung oleh kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi desa adat. Penanganan Covid-19 berbasis desa adat, integrasi layanan kesehatan tradisional, serta program dana desa dan pengentasan kemiskinan menjadi contoh kebijakan yang mampu meningkatkan perlindungan sosial dan ketahanan masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan di sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi publik menunjukkan efektivitas yang lebih terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya keberlanjutan kebijakan, tantangan koordinasi kelembagaan, serta rendahnya tingkat adopsi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi juga oleh kapasitas implementor, sensitivitas terhadap konteks lokal, dan mekanisme partisipatif yang inklusif.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan publik yang kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperkuat analisis dengan data empiris lapangan guna memperdalam pemahaman hubungan antara implementasi kebijakan dan indikator kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, K. D. (2022). *Kinerja pemerintah daerah di mata publik: Studi kasus penanganan pandemi Covid-19 di Bali tahun 2020*. Journal Publicuho, 5(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.24>
- Fernanda, T., & Arif, L. (2023). *Implementasi program bantuan sosial pemberian makanan gratis bagi warga miskin di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 9(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2586>
- Hariati, H., Zulfiani, D., Saputri, A. S., et al. (2023). *The policy of Pro-Bebaya in improving the welfare of the community in the Samarinda City*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 13(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i2.52988>
- Kalpika Sunu, M. K., & Utama, M. S. (2019). *Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 8(8). <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.V08.I08.P02>
- Kresna Sudiatmika, I. B., Jimbara, R., & Setyohadi, D. B. (2017). *Determination of assistance to the poor by integrating fuzzy AHP and TOPSIS models (Case study Bali Province)*. In Proceedings of ICICOS. <https://doi.org/10.1109/ICICOS.2017.8276344>
- Merta, I. B. A. A., Utama, M. S., Budhi, M. K. S., et al. (2016). *Impact of government expenditure, human capital and regional economic development performance on people welfare in Bali Province, Indonesia*. Journal of Economics and Sustainable Development.
- Rahman, A., Jeddawi, M., & Mansyur, M., et al. (2023). *Implementasi kebijakan penanganan gempa bumi Lombok 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014*. Jurnal Wahana Bhakti Praja. <https://doi.org/10.33701/jiwp.v13i1.3362>
- Salam, R., Samudra, A. A., & Suradika, A., et al. (2024). *Future policy implementation to balance growth and sustainability: Managing the impact of mass tourism in Bali*. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(9). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i9.7927>
- Sari, N. L. P. R., Pinatih, D. A. A. I., Juniarta, I. K., et al. (2022). *Dualitas sekala-niskala dalam Pararem Gering Agung: Memahami penanganan Covid-19 berbasis adat dari perspektif kebijakan publik di Bali*. Jurnal Kajian Bali, 12(1). <https://doi.org/10.24843/jkb.2022.v12.i01.p03>

- Sriwulandari, K., Wirantari, I. D. A. P., & Prabawati, N. (2024). *Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dalam upaya peningkatan produksi padi di Subak Kabupaten Bangli*. <https://doi.org/10.61292/shkr.114>
- Sudana, I. W., Wiratmaja, I. N., Suacana, W. G., et al. (2019). *The impact of Gerbang Sadu Mandara policy of Bali Province toward poverty reduction program*. <https://doi.org/10.22225/SINTESA.8.1.1048.17-22>
- Sukadana, I. G. K., Sutama, I. N., & Karma, N. M. S. (2022). *Covid-19 prevention handling model Bali Province Government*. *Sociological Jurisprudence Journal*, 5(1), 25-31. <https://doi.org/10.22225/scj.5.1.2022.25-31>
- Sumada, I. M., & Samudra, A. A. (2023). *Implementation of HIV/AIDS prevention policies: The study in Bali Province, Indonesia*. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 7(2). <https://doi.org/10.24294/jipd.v7i2.2287>
- Tifani, A., Anwar, A., & Kurniawan, A. W., et al. (2023). *Effectiveness of the role of program community facilitators national affordable housing program (NAHP) ministry of PUPR in Bali Province*. *Marginal Journal of Management Accounting General Finance and International Economic Issues*, 2(2). <https://doi.org/10.55047/marginal.v2i2.641>
- Udayana, I. M. A., & Sukraaliawan, I. N. (2022). *Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Ambengan*. *Locus*, 13(2). <https://doi.org/10.37637/locus.v13i2.771>
- Widanti, N. P. T., & Dewi, L. R. S. (2022). *Implementation of Klungkung Regent Regulation Number 15 of 2020 concerning guidelines for grants and social assistance*. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10537>
- Widhyastuti, A. A. M. (2016). *Implementasi program Trans Sarbagita dalam pengembangan transportasi publik di Bali* (Disertasi).
- Widnyana, I. M. A., & Winia, I. N. (2024). *Policy on prohibition of advertising traditional health services conducted by traditional healers in Bali*. *International Journal of Social Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.25078/ijoss.v2i2.4380>
- Widnyana, I. M. A., Kantriani, N. K., & Siwananda, Y. (2024). *Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi*. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 40-45. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.40-45>
- Yudartha, I. P. D. (2020). *New face of local government: Synergy of handling the spread of Covid-19 between local governments and indigenous villages in Bali*. <https://doi.org/10.30589/PROCEEDINGS.2020.397>